

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pendapatan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara. Jumlah Pegawai Negeri Sipil sendiri berjumlah 69 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 2 Orang Subbag. Renval, 7 Orang Subbag. Keuangan, 1 Orang Subbag. Umum dan Kepegawaian, 19 Orang Bidang Pendapatan, 7 Orang Bidang Anggaran, 16 Orang Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, dan 15 Orang pada Bidang Akuntansi dan Aset Daerah.

Data pada penelitian ini adalah (n) sebanyak 69, data didapat dari Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Jepara yang terdiri dari 69 responden. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik total sampling atau sensus dengan menyebarkan kuesioner yang dilakukan pada semua populasi yaitu seluruh PNS.

Penyebaran kuesioner dilakukan selama 10 hari yaitu mulai tanggal 1 Februari sampai 10 Februari 2018. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 69 dan jumlah yang kembali sejumlah kuesioner yang dibagikan.

4.2 Deskripsi Responden

Kriteria responden yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Jepara. Deskripsi responden pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara diidentifikasi dengan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan masa kerja.

Berdasarkan tabel 4.1 berikut ini, akan disajikan informasi umum mengenai kondisi responden yang dapat di analisis secara kualitatif:

Tabel 4.1
Deskripsi Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Jenis Kelamin:		
	a. Laki-laki	31	45%
	b. Perempuan	38	55%
	TOTAL	69	100%
2.	Usia:		
	a. 17-25 Tahun	11	16%
	b. 26-34 Tahun	38	55%
	c. 35-42 Tahun	20	29%
	d. 43-50 Tahun		
	e. 50-keatas		
	TOTAL	69	100%
3.	Pendidikan:		
	a. SMA	8	11%
	b. D3	6	9%
	c. S1	40	58%
	d. S2	15	22%
	e. S3		
	TOTAL	69	100%
4.	Masa Kerja		
	a. < 5 Tahun	11	16%
	b. 5-10 Tahun	51	74%
	c. > 10 Tahun	7	10%
	TOTAL	69	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2018

4.3 Analisa Data

4.3.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskripsi variabel bertujuan untuk menggambarkan atau mengembangkan profil data penelitian serta mendeskripsikan masing-masing variabel pada setiap hipotesis. Hal-hal yang akan dikaji dalam membahas deskripsi variabel penelitian adalah banyaknya responden pada kategori penilaian.

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer mengenai keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural, komitmen organisasi dan kecurangan pada sektor pemerintah pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara, maka dengan bantuan Software SPSS 20 diperoleh hasil statistik deskriptif mengenai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi.

Berikut adalah tabel statistik deskriptif variabel:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kecurangan pada Sektor Pemerintah	69	2,00	5,00	3,8257	,68926
Keefektifan Pengendalian Internal	69	2,40	4,40	3,5826	,56124
Asimetri Informai	69	2,40	4,40	3,6377	,52611

Penegakan Hukum	69	2,40	4,20	3,3623	,57011
Kesesuaian Kompensasi	69	2,60	4,80	3,7507	,54708
Keadilan Procedural	69	2,33	4,67	3,6784	,60338
Komitmen Organisasi	69	2,20	4,60	3,7507	,50224

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 20

Berdasarkan tabel diatas, dapat di lihat bahwa N sampel berjumlah 69, dengan hasil dari penelitian pengukuran statistik deskriptif variabel keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural, komitmen organisasi dan kecurangan pada sektor pemerintah. Dalam tabel tersebut, terlihat bahwa seluruh variabel X dan Y mempunyai nilai Standar Deviasi di bawah rata-rata (mean), dimana data untuk variabel keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural, komitmen organisasi dan kecurangan pada sektor pemerintah diartikan tidak terjadi penyelewengan yang cukup menyimpang.

4.3.2 Uji Kualitas Data

Suatu pengukuran dan pengujian kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik apabila instrumen teknik pengumpulan data tidak memiliki tingkat keabsahan (*Validity*) dan tingkat keandalan (*Reliability*) yang tinggi. Oleh karena itu kuesioner terlebih dahulu harus diuji keandalan dan keabsahannya.

1. Uji Validitas

Sebelum penyajian data lebih lanjut maka harus dilakukan Uji Instrumen. Uji instrumen perlu dilakukan dalam penelitian ini karena pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan angket atau kuesioner. Uji instrumen meliputi:

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkap atau menjelaskan sesuatu yang akan diukur. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara r_{hitung} dengan r_{tabel} . Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pertanyaan valid
- b. $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item pertanyaan tidak valid
- c. $r_{hitung} > r_{tabel}$ tapi negatif, maka item pertanyaan tidak valid

Hasil uji validitas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Uji Validitas

Variabel	No.	r hitung	r tabel	Kriteria
Keefektifan Pengendalian Internal	1	0,644	0,2335	Valid
	2	0,283	0,2335	Valid
	3	0,716	0,2335	Valid
	4	0,779	0,2335	Valid
	5	0,770	0,2335	Valid
Asimetri Informasi	1	0,420	0,2335	Valid
	2	0,337	0,2335	Valid
	3	0,445	0,2335	Valid
	4	0,549	0,2335	Valid
	5	0,334	0,2335	Valid

Penegakan Hukum	1	0,815	0,2335	Valid
	2	0,504	0,2335	Valid
	3	0,393	0,2335	Valid
	4	0,610	0,2335	Valid
	5	0,525	0,2335	Valid
Kesesuaian Kompensasi	1	0,796	0,2335	Valid
	2	0,796	0,2335	Valid
	3	0,413	0,2335	Valid
	4	0,490	0,2335	Valid
	5	0,322	0,2335	Valid
Keadilan Procedural	1	0,507	0,2335	Valid
	2	0,358	0,2335	Valid
	3	0,536	0,2335	Valid
	4	0,405	0,2335	Valid
	5	0,788	0,2335	Valid
	6	0,416	0,2335	Valid
Komitmen Organisasi	1	0,772	0,2335	Valid
	2	0,568	0,2335	Valid
	3	0,376	0,2335	Valid
	4	0,776	0,2335	Valid
	5	0,735	0,2335	Valid
Kejelasan pada Sektor Pemerintah	1	0,698	0,2335	Valid
	2	0,592	0,2335	Valid
	3	0,495	0,2335	Valid

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,2335) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan untuk variabel akses valid.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi item-item pertanyaan yang digunakan. Untuk mengukur reliabilitas dari instrumen penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

Cronbach Alpha. Nilai Cronbach Alpha antara 0,80 – 1,0 dikatakan reliabelitas baik, nilai 0,60 – 0,79 dikategorikan reliabilitasnya dapat diterima, nilai $\leq 0,60$ dikategorikan reliabilitasnya buruk (Sekaran,2006). Hasil pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Software SPSS 20.0 for Windows*. Item pernyataan dikatakan reliabel jika item pertanyaan dijawab konsisten dan tidak boleh acak maka pertanyaan tersebut tidak bisa diuji kekonsistensinya.

Hasil output analisis reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Uji Reliabilitas

No.	Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Kriteria
1	Keefektifan Pengendalian Internal	0,825	Reliabel
2	Asimetri Informasi	0,651	Reliabel
3	Penegakan Hukum	0,772	Reliabel
4	Kesesuaian Kompensasi	0,764	Reliabel
5	Keaslian Procedural	0,719	Reliabel
6	Komitmen Organisasi	0,826	Reliabel
7	Kecurangan pada Sektor Pemerintah	0,741	Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki cronbach alpha lebih dari 0,6 ($\alpha > 0,6$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6 dan Y adalah reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi klasik. Uji asumsi klasik untuk menghindari perolehan yang bias. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Sepertidiketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji Kolmogrov-Smirnov Test. Residual berdistributif normal jika memiliki nilai signifikan $> 0,05$. Berikut adalah hasil pengujian menggunakan analisis grafik dalam SPSS 20:

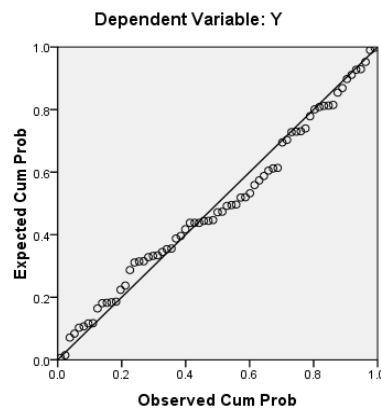
Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.26095950
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.071
Kolmogorov-Smirnov Z		.640
Asymp. Sig. (2-tailed)		.808

Berdasarkan besar nilai Kolmogrov-Smirnov Test yaitu 0,640 dan signifikansi yaitu 0,808 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya, data residual berdistribusi secara normal. Hal ini juga didukung dengan grafik normal P-P Plot dimana data mengikuti garis diagonal. Berikut hasil uji normalitas berdasarkan grafik Normal P-P Plot sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1
Grafik P-P Plot

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 20

Berdasarkan grafik P-P Plot diatas, terlihat bahwa titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal menuju ke pola distribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen kecurangan pada sektor pemerintah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel indeoenden. Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel independen. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *VIF* < 10 , maka dapat disimpulkan databebas dari gejala multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerancy	VIF
	(Constant)		
	Keefektifan Pengendalian Internal	,170	5,897
	Asimetri Informasi	,195	5,128
	Penegakan Hukum	,210	4,760
	Kesesuaian Kompensasi	,222	4,509
	Keadilan Procedural	,136	7,328
	Komitmen Organisasi	,166	6,036
a. Dependent Variabel: Kecurangan pada Sektor Pemerintah			

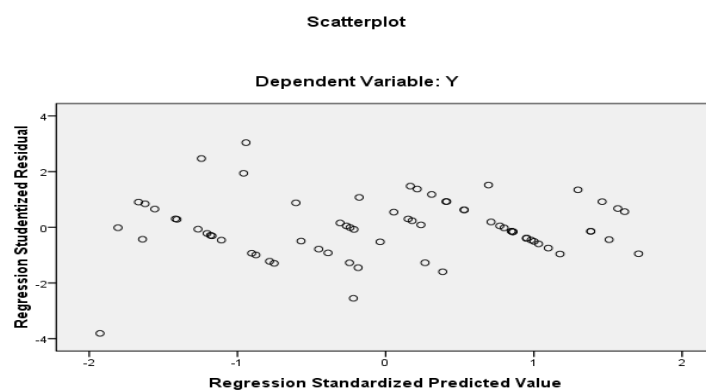
Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20

Berdasarkan tabel uji multikolinieritas diatas dapat disimpulkan bahwa setiap variabel bebas keefektifan pengendalian internal (X1), asimetri informasi (X2), penegakan hukum (X4), kesesuaian kompensasi (X5), keadilan procedural (X6) mempunyai nilai *tolerance* $> 0,1$ yaitu 0,170, 0,195, 0,210, 0,222, 0,136, 0,166 dan VIF yaitu

5,897, 5,128, 4,760, 7,328, dan 6,036. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan *variance* residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain atau disebut dengan homoskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot* model tersebut dengan pola titik yang tersebar di atas dan di bawah sumbu Y. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas:



Gambar 4.2
Scatterplot

Sumber: hasil pengolahan SPSS 20

Pada grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta dan tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu

Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu keefektifan pengendalian intenal, asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural dan komitmen organisasi terhadap variabel dependen yaitu kecurangan pada sektor pemerintah maka digunakan uji linier berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \mu$

Tabel 4.7
Hasil Uji Analisis Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-.085	.270	
X1	-.751	.143	-.612
X2	-.149	.143	-.114
X3	.852	.127	.705
X4	.090	.129	.072
X5	.464	.149	.406
X6	.596	.162	.434

a. Dependent Variable: Kecurangan pada sektor pemerintah

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi berganda sebagaiberikut: $Y = -0,085 - 0,752 X_1 - 0,149 X_2 + 0,852 X_3 + 0,090 X_4 +$

$0,464 X5 + 0,596 X6$. Persamaan regresi tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta $a = -0,085$

Nilai konstanta bernilai negatif dimana nilai konstanta sebesar $-0,085$ maka dapat menjelaskan variabel (X1) Keefektifan pengendalian internal, (X2) Asimetri informasi, (X3) Penegakan hukum, (X4) Kesesuaian kompensasi, (X5) keadilan procedural dan (X6) komitmen organisasi.

2. Koefisien $b1 = -0,751$

Koefisien bernilai negatif. Artinya variabel (X1) keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh negatif terhadap kecurangan pada sektor pemerintah. Semakin tinggi keefektifan pengendalian internal maka akan menurunkan kecurangan pada sektor pemerintah di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.

3. Koefisien $b2 = -0,149$

Koefisien bernilai negatif. Artinya, variabel asimetri informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kecurangan pada sektor pemerintah. Kondisi asimetri informasi yang terjadi antara pegawai dan pimpinan bersifat netral sehingga tidak berpengaruh terhadap kecurangan pada sektor pemerintah di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.

4. Koefisien $b3 = 0,852$

Koefisien regresi bernilai positif. Artinya variabel penegakan hukum mempunyai pengaruh positif terhadap kecurangan pada sektor pemerintah. Semakin tinggi tingkat penegakan hukum yang berlaku maka akan meningkatkan kecurangan pada sektor pemerintah di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.

5. Koefisien $b_4 = 0,090$

Koefisien bernilai positif. Artinya variabel kesesuaian kompensasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kecurangan pada sektor pemerintah. Dimana pemberian kompensasi yang cukup belum tentu dapat menekan terjadinya kecurangan pada sektor pemerintah di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten hbb Jepara.

6. Koefisien $b_5 = 0,464$

Koefisien bernilai positif. Artinya variabel keadilan procedural mempunyai pengaruh positif terhadap kecurangan pada sektor pemerintah. Semakin tinggi tingkat keadilan procedural maka akan meningkatkan kecurangan pada sektor pemerintah di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.

7. Koefisien $b_6 = 0,596$

Koefisien bernilai positif, artinya variabel komitmen organisasi mempunyai nilai positif terhadap kecurangan pada sektor pemerintah. Semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka

akan meningkatkan kecurangan pada sektor pemerintah di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.

4.3.5 Uji Hipotesis

1. Uji Signifikan Parameter Individual (t)

Uji statistik t dugubakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen (keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural, komitmen organisasi) terhadap variabel dependen (kecurangan pada sektor pemerintah). Uji t dilakukan dengan membandingkan signifikan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai signifikan $< \alpha: 0,05$. Berikut adalah hasil pengeujian uji t:

Tabel 4.8
Hasil Uji T

Coefficients ^a		
Model	T	Sig.
(Constant)		
X1 (Keefektifan Pengendalian Internal)	-5,239	0,000
X2 (Asimetri Informasi)	-1,047	0,299
1 X3 (Penegakan Hukum)	6,716	0,000
X4 (Kesesuaian Kompensasi)	0,701	0,486
X5 (Keadilan Procedural)	3,122	0,003
X6 (Komitmen Organisasi)	3,677	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 20

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil uji tadalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis dari variabel Keefektifan Pengendalian internal (X1) dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Nilai t hitung adalah -5,239 padatingkat signifikansi 0.000. sedangkan nilai t tabel pada $\alpha = 0,05$ (uji dua arah) dan $df = 69$ sebesar 1,667.

Dari hasil uji t dapat dikatakan bahwa $-t$ hitung $-5,239 < -t$ tabel $-1,667$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah sehingga H1 diterima.

2. Hasil analisis dari variabel Asimetri Informasi (X2) dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Nilai t hitung adalah $-1,047$ pada tingkat signifikansi $0,299$. sedangkan nilai t tabel pada $\alpha = 0,05$ (uji dua arah) dan $df = 69$ sebesar $1,667$. Dari hasil uji t dapat dikatakan bahwa $-t$ hitung $-1,047 < -t$ tabel $-1,667$ dan nilai signifikansi $0,299 > 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa Asimetri Informasi tidak berpengaruh terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah sehingga H2 ditolak.
3. Hasil analisis dari variabel Penegakan Hukum (X3) dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Nilai t hitung adalah $6,716$ pada tingkat signifikansi $0,000$. sedangkan nilai t tabel pada $\alpha = 0,05$ (uji dua arah) dan $df = 69$ sebesar $1,667$. Dari hasil uji t dapat dikatakan bahwa t hitung $6,716 > t$ tabel $1,667$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah sehingga H3 diterima.
4. Hasil analisis dari variabel Kesesuaian Kompensasi (X4) dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Nilai t hitung adalah $0,701$ pada tingkat signifikansi $0,486$. sedangkan nilai t

tabel pada $\alpha = 0,05$ (uji dua arah) dan $df = 69$ sebesar 1,667. Dari hasil uji t dapat dikatakan bahwa t hitung $0,701 > t$ tabel 1,667 dan nilai signifikansi $0,486 > 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa Kesesuaian Kompensasi tidak berpengaruh terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah sehingga H_4 ditolak

5. Hasil analisis dari variabel Keadilan Procedural (X5) dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Nilai t hitung adalah 3,122 pada tingkat signifikansi 0.003. sedangkan nilai t tabel pada $\alpha = 0,05$ (uji dua arah) dan $df = 69$ sebesar 1,667. Dari hasil uji t dapat dikatakan bahwa t hitung $3,122 > t$ tabel 1,667 dan nilai signifikansi $0,003 < 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa Keadilan Procedural berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah sehingga H_5 diterima.
6. Hasil analisis dari variabel Komitmen Organisasi (X6) dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Nilai t hitung adalah 3,677 pada tingkat signifikansi 0.000. sedangkan nilai t tabel pada $\alpha = 0,05$ (uji dua arah) dan $df = 69$ sebesar 1,667. Dari hasil uji t dapat dikatakan bahwa t hitung $3,677 > t$ tabel 1,667 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah sehingga H_6 diterima.

2. Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji Simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel independen. Uji f dilakukan menggunakan distribusi F yaitu dengan membandingkan signifikansi f hitung dengan f tabel. Berikut adalah hasil dari uji f:

Tabel 4.9
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	27,675	6	4,612	61,754	,000 ^a
Residual	4,631	62	,075		
Total	32,305	68			

- a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Keadilan Procedural, Kesesuaian Kompensasi, Penegakan Hukum, Asimetri Informasi
- b. Dependent Variable: Kecurangan pada Sektor Pemerintah

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 20

Dari uji ANOVA di dapat nilai f_{hitung} sebesar 61,754 dengan nilai signifikansi 0,000 sedangkan nilai f_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 dan $df=68$ ($69-1$) sebesar 2,24 sehingga nilai f_{hitung} $61,754 > f_{tabel}$ 2,24. Apabila $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan signifikansinya $< 0,05$ maka hasil analisis tersebut dapat dinyatakan signifikan. Dapat disimpulkan bahwa variabel Keefektifan Pengendalian Internal (X1), Asimetri Informasi (X2), Penegakan Hukum (X3), kesesuaian kompensasi (X4), Keadilan Procedural (X5) dan Komitmen Organisasi (X6)

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah (Y).

4.3.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4.10
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,928 ^a	,857	,843

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 20

Dari tabel diatas maka dapat diketahui:

- a) $R = 0,928^a$ berarti kemampuan menjelaskan variabel keefektifan pengendalian internal,asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural dan komitmen organisasi baik karena nilai mendekati satu.
- b) Adjusted R Square 0,843 berarti 854,3% faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara dapat

dijelaskan oleh faktor keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural dan komitmen organisasi. Sedangkan 15,7% (100%-84,3%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah

Berdasarkan pengujian secara parsial (t) menunjukkan bahwa variabel Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada sektor pemerintah di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara. Hal ini terlihat dari variabel Keefektifan Pengendalian Internal (X1) dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} adalah -5,239 pada tingkat signifikan 0,000, sedangkan nilai t_{tabel} pada $df = 69$ sebesar 1,667 dan $\alpha = 0,05$ (uji dua arah). Dari hasil uji t dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikan $0,000 < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Keefektifan Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah.

Hal tersebut disebabkan Keefektifan Pengendalian Internal bertujuan untuk menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan serta menilai kinerja perusahaan atau instansi

dan manajemen. Keefektifan pengendalian internal dapat mencegah kerugian pengelolaan sumber daya perusahaan atau instansi. Oleh karena itu, keefektifan pengendalian internal yang baik diharapkan mampu untuk mengurangi kecurangan pelaporan keuangan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan Najahningrum (2013), Ikhsan dkk (2014), yang melihat keefektifan Pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan pada sektor pemerintah. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan jika semakin efektif pengendalian internal maka semakin kecil kecenderungan terjadinya kecurangan.

4.4.2 Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah

Berdasarkan pengujian parsial (t) menunjukkan bahwa variabel Asimetri Informasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan pada sektor pemerintah di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara. Hal ini terlihat dari analisis dari variabel Asimetri Informasi (X2), dilakukan dengan membandingkan t hitung dan t tabel. Nilai t hitung adalah -1,042 pada tingkat signifikan 0,299, sedangkan nilai t tabel pada $\alpha = 0,05$ (uji dua arah) dan $df = 69$ sebesar 1,667. Dari hasil uji t dapat dikatakan bahwa $-t \text{ hitung } -1,042 < t \text{ tabel } 1,667$ dan nilai signifikan $0,299 > \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Asimetri Informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah.

Seorang pegawai yang memiliki jabatan sebagai kepala bagian yang mengatur instansi akan mengetahui informasi internal yang lebih banyak dibandingkan pimpinan. Sehingga sebagai pengatur, kepala bagian wajib mengkomunikasikan mengenai keadaan instansi kepada pimpinan yang diserahkan dalam bentuk laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai ada instansi cenderung netral serta memahami seluruh informasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian asimetri informasi tidak terjadi karena masing-masing antara pegawai dengan pimpinan tidak ada kesenjangan informasi.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan Ahriati, Basuki dan Widiastuty (2015) dan Octakisti (2017) yang melihat tidak adanya pengaruh Asimetri Informasi terhadap kecurangan pada sektor pemerintah. Artinya kondisi asimetri informasi dalam penelitian ini tidak ditemukan. Hal tersebut disebabkan tidak adanya kesenjangan informasi antara pegawai dengan pimpinan instansi tersebut.

4.4.3 Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah

Berdasarkan pengujian secara parsial (t) menunjukkan bahwa variabel Penegakan Hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pada sektor pemerintah di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara. Hal ini terlihat dari variabel Penegakan

Hukum (X3) dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} adalah 6,716 pada tingkat signifikan 0,000, sedangkan nilai t_{tabel} pada $df = 69$ sebesar 1,667 dan $\alpha = 0,05$ (uji dua arah). Dari hasil uji t dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} 6,716 < t_{tabel} 1,667$ dan nilai signifikan $0,000 < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah.

Dimana Penegakan hukum pada sektor pemerintah harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam rangka memajukan suatu daerah, contohnya adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) peraturan tersebut merupakan salah satu pengendalian dari pemerintah dengan tujuan pengelolaan APBD berjalan secara transparan sesuai dengan kepentingan publik. Apabila pengelolaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan memungkinkan terjadinya kecurangan dari individu yang terlibat baik secara langsung maupun tidak. Penegakan hukum yang berlaku dalam pemerintah lebih cenderung pada penetapan tata tertib atau peraturan yang ada dalam instansi tersebut sehingga dalam hal penegakan hukum ini tidak dapat mendeteksi kemungkinan pegawai yang terlihat patuh namun dalam kenyataannya melakukan kecurangan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan Ardiyaningsih, Ardiyani dan Adi (2016) dan Adinda (2015) yang melihat adanya pengaruh positif dan signifikan Penegakan Hukum

terhadap kecurangan pada sektor pemerintah. Kebanyakan masyarakat memahami dan mengetahui tentang hukum dan mereka tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi dan menaati hukum yang berlaku dengan semestinya. Dengan demikian semakin rendah tingkat penegakan hukum yang berlaku pada setiap instansi organisasi, maka dapat membuka kesempatan terjadinya kecurangan (fraud).

4.4.4 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan pada

Sektor Pemerintah

Berdasarkan pengujian secara parsial (t) menunjukkan bahwa variabel Kesesuaian Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan pada sektor pemerintah di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara. Hal ini terlihat dari variabel Kesesuaian Kompensasi (X4) dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} adalah 0,701 pada tingkat signifikan 0,000, sedangkan nilai t_{tabel} pada $df = 69$ sebesar 1,667 dan $\alpha = 0,05$ (uji dua arah) . Dari hasil uji t dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} 0,701 < t_{tabel} 1,667$ dan nilai signifikan $0,486 < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah.

Kompensasi merupakan semua pendapatan dalam bentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan atau instansi (Hasibuan, 2009). Dalam penelitian ini pemberian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Hal ini disebabkan pemberian kompensasi baik dalam

berupa uang maupun barang meliputi gaji pokok, tunjangan, insentif dalam suatu instansi sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah No 7 Tahun 1977. Sehingga pemberian kompensasi yang mereka terima sudah sesuai dan diharapkan akan meminimalkan terjadinya kecurangan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan Ikhsan dan Chandra (2015), Ikhsan (2014), yang melihat tidak adanya pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan pada sektor pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian gaji dan kompensasi tidak ada hubungannya dengan kecurangan. Hal itu disebabkan pemberian gaji pada sebuah instansi sudah distandarkan melalui peraturan pemerintah yang berlaku.

4.4.5 Pengaruh Keadilan Procedural terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah

Berdasarkan pengujian secara parsial (t) menunjukkan bahwa variabel Keadilan Procedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pada sektor pemerintah di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara. Hal ini terlihat dari variabel Keadilan Procedural (X_5) dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} adalah 3,122 pada tingkat signifikan 0,003, sedangkan nilai t_{tabel} pada $df = 69$ sebesar 1,667 dan $\alpha = 0,05$ (uji dua arah). Dari hasil uji t dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} 3,122 < t_{tabel} 1,667$ dan nilai signifikan $0,003 < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Keadilan Procedural secara

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah.

Keadilan procedural merupakan suatu pertimbangan yang dibuat oleh karyawan yang berkaitan dengan keadilan yang dipersepsikan mengenai proses dan prosedur organisasi untuk membuat keputusan alokasi dan sumberdaya (Ivancevich 2007) dalam (Ardyaningsih, Ardiyani dan Adi 2016). Dalam penelitian ini pegawai dalam instansi pemerintah beranggapan jika prosedur penggajian dan pemberian kompensasi yang telah sesuai dengan yang diinginkan oleh para pegawai selain itu, segala proses dan prosedur organisasi yang ada dalam instansi tersebut sudah dijalankan dengan baik, sehingga menciptakan keadilan dan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan Sukardi Ihsan (2014), Najahningrum (2014) dan Sari (2014) dan yang melihat pengaruh keadilan procedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pada sektor pemerintah. Ketika seseorang mempersepsikan bahwa prosedur pemberian gaji maupun kompensasi lainnya dilakukan secara tidak adil maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan kecurangan, hal tersebut disebabkan mereka tidak merasa puas dengan apa yang mereka dapat. Sehingga semakin rendah keadilan procedural yang berlaku pada instansi atau organisasi maka akan berpeluang untuk terjadi tindak kecurangan (fraud).

4.4.6 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah

Berdasarkan pengujian secara parsial (t) menunjukkan bahwa variabel Kesesuaian Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pada sektor pemerintah di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara. Hal ini terlihat dari variabel Kesesuaian Kompensasi (X6) dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} adalah 3,677 pada tingkat signifikan 0,000, sedangkan nilai t_{tabel} pada $df = 69$ sebesar 1,667 dan $\alpha = 0,05$ (uji dua arah) . Dari hasil uji t dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} 3,677 < t_{tabel} 1,667$ dan nilai signifikan $0,000 < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah.

Hal tersebut dikarenakan pegawai instansi pemerintah lebih cenderung berkomitmen kepada organisasi jika kondisi dan situasi dari tanggungjawab dan hasil tugas yang mereka kerjakan menguntungkan baginya namun yang terjadi adalah sebaliknya.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan Indra (2017), Irwandi (2012) dan Sari (2014) dan yang melihat pengaruh Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pada sektor pemerintah. Sebuah komitmen akan terwujud apabila komponen-komponen dalam operasional sebuah instansi berjalan dengan baik serta masing-masing individu mampu menjalankan

hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian semakin rendah komitmen organisasi pada sebuah instansi maka dapat membuka kesempatan terjadinya kecurangan (fraud).

4.4.7 Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Penegakan Hukum, Kesesuaian Kompensasi, Keadilan Procedural dan Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan pada Sektor Pemerintah

Hasil perhitungan pada tabel 4.3 untuk Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Penegakan Hukum, Kesesuaian Kompensasi, Keadilan Procedural dan Komitmen Organisasi dimana f hitung 61,754 dan signifikan pada 0,000. Oleh karena probabilitas di bawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 7 yang menyatakan Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Penegakan Hukum, Kesesuaian Kompensasi, Keadilan Procedural dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif secara simultan dan signifikan pada Kecurangan pada Sektor Pemerintah Kabupaten Jepara. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh kurnia Adi, Ardiyani, Ardianingsih, 2016 dan adinda (2015) yang menunjukkan Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Penegakan Hukum, Kesesuaian Kompensasi, Keadilan Procedural dan Komitmen Organisasi berpengaruh simultan dan signifikan terhadap penyerapan tenaga